

INDONESIA REPORT 2022
POTRET DAN PERSEPSI
MASYARAKAT TENTANG
KEBEBASAN EKONOMI
INDONESIA TAHUN 2022

NURI RESTI CHAYYANI
PENELITI BIDANG EKONOMI



RINGKASAN EKSEKUTIF



Sepanjang tahun 2022 merupakan prosesi pemulihan ekonomi akibat pandemi. Belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan resesi ekonomi sejak tahun 2020, kini perekonomian Indonesia ikut dihadapkan dengan dinamika perekonomian global akibat konflik yang terjadi yaitu invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini juga ikut mengguncang perdagangan hingga berdampak ke sisi moneter dan sisi fiskal terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia.

Proses pemulihan ekonomi Indonesia berangsur lancar sejak tahun 2021. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama. Pada awal tahun 2022, Indonesia sudah dihadapkan dengan kenaikan harga minyak mentah yang jauh dari perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bersamaan dengan hal itu, Indonesia juga mengalami kelangkaan Crude Palm Oil (CPO) untuk kebutuhan pangan. Akibatnya, pemerintah membuat kebijakan larangan ekspor CPO untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Hal itu kembali menyebabkan efek domino bagi pasar dalam negeri.

Di sisi lain, kebijakan pengaturan harga oleh pemerintah juga berdampak pada kondisi kebebasan ekonomi Indonesia. Kebebasan ekonomi Indonesia juga telah dinilai oleh lembaga seperti Fraser Institute dan Heritage Foundation. Namun, harus diakui bahwa lembaga-lembaga yang melakukan penilaian kebebasan ekonomi tersebut juga tidak mengetahui secara pasti dan komprehensif mengenai kondisi yang ada dalam negeri.

Untuk itu, Indonesia Report Tahun 2022 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) di bidang ekonomi bertujuan untuk mengungkapkan kondisi kebebasan ekonomi Indonesia selama tahun 2022 dan persepsi kebebasan ekonomi dari masyarakat. Penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan dari tahun sebelumnya dengan beberapa penambahan topik pilihan, yaitu analisis kondisi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan persepsi masyarakat. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif data sekunder dan pembagian angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum variabel kapasitas pemerintah, penegakan hukum, penyebaran uang, perdagangan internasional, dan regulasi yang memudahkan individu sudah menunjukkan kondisi kebebasan ekonomi dengan baik. Namun, pada persepsi masyarakat, regulasi yang memudahkan individu pada pasar tenaga kerja dan pasar uang dinilai tidak memberikan kebebasan ekonomi untuk masyarakat.

Daftar Isi

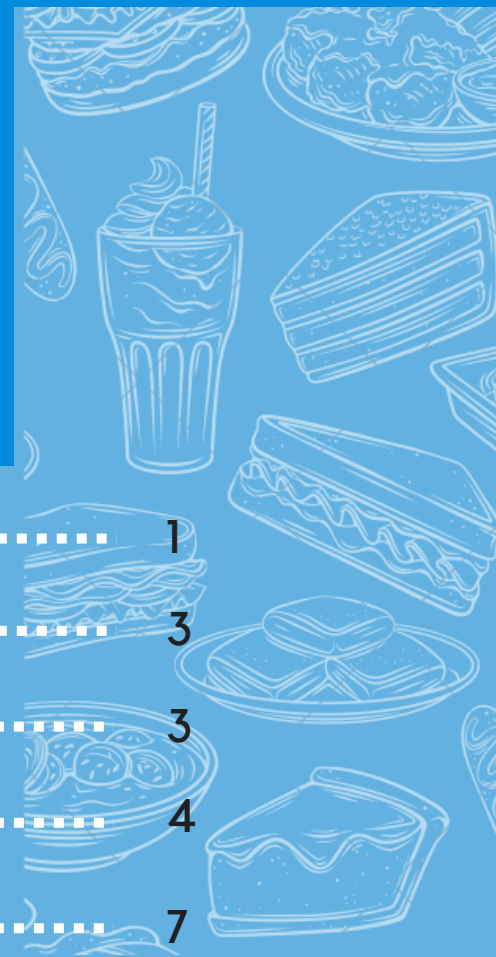


Ringkasan Eksekutif

.....

DAFTAR

Daftar Singkatan	04
Daftar Tabel	05
Daftar Grafik	05



Pendahuluan	1
Pertanyaan Penelitian	3
Metodologi Penelitian	3
Kajian Literatur	4
Temuan	7
Kesimpulan	21
Rekomendasi	21
Referensi	24
Profil Penulis dan Instansi	27



Daftar Singkatan



ADH	Batas Dasar Harga Berlaku
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BI	Bank Indonesia
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	Badan Pusat Statistik
BTKI	Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CPO	Crude Palm Oil
DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DPK	Dana Pihak Ketiga
FDI	Foreign Direct Investment
FTA	Free Trade Agreement
HAKI/HKI	Hak atas Kekayaan Intelektual
IHK	Indeks Harga Konsumen
IKN	Ibu Kota Negara
JUB	Jumlah Uang Beredar
K/L	Kementerian/Lembaga
KPBU	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
PDB	Produk Domestik Bruto
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan Barang Mewah
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SBN	Surat Berharga Negara
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UKM	Usaha Kecil Menengah
UMK	Usaha Mikro Kecil



Daftar Tabel



Perbandingan Aset BUMN dengan PDB 2017-2021 (dalam triliun rupiah)	09
Kondisi Demografi Responden	18
Hasil Angket Persepsi Masyarakat terhadap Kebebasan Ekonomi di Indonesia	19

Daftar Grafik

Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat pada Triwulan II-2022	08
Nilai Kepemilikan Asing dalam SBN (3 Januari-6 Juli 2022)	14
Dana Pihak Ketiga (Januari-Juli 2022)	04
Pertumbuhan Kredit UMKM	21



PENDAHULUAN

Laporan tahunan di bidang ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kali ini membahas tentang kondisi dan persepsi masyarakat tentang kebebasan ekonomi di Indonesia. Kebebasan ekonomi merupakan sebuah gagasan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan tujuan kesejahteraan melalui implementasi kelembagaan dan proses ekonomi. Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup tercermin jika hanya dilihat dari besarnya pendapatan per kapita penduduk (Suparyati, 2014). Untuk itu, perlu ada indikator kebebasan ekonomi dalam pengukuran pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia berada dalam bayang-bayang resesi akibat kondisi ketidakpastian global. Bahkan, Survei Bloomberg yang dirilis pada bulan Juli 2022 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam urutan ke-14 dari 15 negara yang memiliki peluang untuk resesi ([bbc.com](https://www.bbc.com), 14/07/2022). Hal tersebut merupakan sebuah *warning* bagi pemerintah untuk berbenah dan lebih mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan apalagi pemulihan ekonomi akibat *coronavirus disease 2019* (Covid-19) masih dalam proses, sehingga diperlukan mitigasi yang tepat.

Dalam Survey Bloomberg, indikator resesi yang digunakan adalah pendapat ekonomi dunia mengenai tingkat risiko resesi di sejumlah negara Asia. Menurut para ekonom, kebijakan bank sentral di negara-negara Asia yang meningkatkan suku bunga acuan akan mengurangi dampak inflasi. Hal itu tentunya mengurangi minat masyarakat untuk meminjam uang ([tempo.co](https://www.tempo.co), 21/07/2022). Dampaknya juga kepada jumlah uang beredar akan berkurang, dan justru akan mengurangi aktivitas ekonomi.

Aktivitas ekonomi masyarakat yang menurun akan berimplikasi pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan angka pengangguran, penurunan produktivitas industri, serta menurunnya penjualan ritel. Ketika semua hal itu terjadi, maka negara dapat dikatakan dalam ambang resesi. Alih-alih ingin mengurangi inflasi, yang diperoleh dari dampak kenaikan suku bunga adalah resesi.

Berbeda dengan pendapat Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu), Sri Mulyani, menyebutkan bahwa potensi tersebut masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 3 persen. Sementara itu, Sri Lanka menjadi negara yang paling berpotensi mengalami resesi di tahun 2023 ([Indonesia.go.id](https://www.indonesia.go.id), 18/07/2022). Indonesia memiliki penentuan indikator yang berbeda dari survei Bloomberg.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, Indonesia memiliki indikator tersendiri untuk menilai resesi negaranya. Indikator tersebut diantaranya kondisi neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, kebijakan moneter, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kondisi rumah tangga dan korporasi.

Bayangan resesi terutama di bidang moneter yang seolah menakutkan tersebut tentunya akan mengancam kebebasan ekonomi Indonesia. Berdasarkan laporan [Index of Economic Freedom 2022 yang dirilis The Heritage Foundation](#), Indonesia memiliki skor indeks kebebasan ekonomi sebesar 64,4 poin. Nilai itu menempatkan Indonesia berada di posisi ke-10 di Asia Tenggara.

Indeks kebebasan ekonomi dari The Heritage Foundation pada tahun 2021 menilai negara-negara dengan ekonomi paling bebas berdasarkan dua belas faktor, di antaranya hak milik, efektivitas yudisial, integritas pemerintah, beban pajak, pengeluaran pemerintah, kesehatan fiskal, kebebasan bisnis, kebebasan tenaga kerja, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, kebebasan investasi, dan kebebasan finansial.

Sementara, [Fraser Institute](#) menyebutkan Indonesia berada pada peringkat ke-59 dari 162 negara. Di peringkat ini, kategori kebebasan ekonomi Indonesia masuk ke dalam kategori "Moderate". Capaian tersebut naik 13 peringkat dibandingkan tahun 2019 yang berada di peringkat ke-72 (Fraser Institute, 2020). Salah satu faktor yang mendukung naiknya peringkat Indonesia adalah semakin berkurangnya peran pemerintah di dalam perekonomian dan juga terkendalinya inflasi di Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2011) menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dan variabel moneter akan berpengaruh pada harga saham. Beban fiskal yang rendah, rendahnya hambatan perdagangan, birokrasi yang tidak berbelit-belit, kestabilan inflasi, berkurangnya kontrol harga, campur tangan yang rendah di sektor perbankan, dan jasa-jasa keuangan memberikan dampak yang baik bagi harga saham. Di sisi lain, kebebasan yang meningkat juga harus didukung oleh fundamental sosial dan politik yang kuat agar tidak menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya persaingan yang tidak sehat yang justru menimbulkan ketidakpastian dan membuat investor enggan untuk berinvestasi.

Kebebasan ekonomi yang digagas oleh The Heritage Foundation merupakan hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Indikator yang berjumlah 12 poin tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk mendapatkan hak sebagai makhluk ekonomi. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, penelitian ini akan membahas tentang kondisi kebebasan Indonesia pada tahun 2022 dan persepsi masyarakat mengenai hal tersebut.

Selain kondisi indikator kebebasan ekonomi, ada satu hal yang tidak kalah penting yaitu mengenai kondisi iklim Usaha Mikro Kecil (UKM) di Indonesia. Hal tersebut dilihat juga kondisinya dalam kebebasan ekonomi karena apabila iklim UKM kondusif, maka dapat dipastikan akan mendorong kebebasan ekonomi dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, serta penyelamatan Indonesia dari resesi. Kemudian, persepsi masyarakat juga penting untuk mewujudkan “good governance” yang selama ini digaungkan. Persepsi masyarakat juga menjadi penguat dalam melihat indikator kapasitas pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana kondisi kebebasan ekonomi Indonesia Tahun 2022?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang kebebasan ekonomi Indonesia selama masa pemulihan ekonomi?
3. Apa saja rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong kebebasan ekonomi?

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan kualitatif. Pendekatan statistik deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, penyajian, analisis dan menafsirkan data untuk diringkas dan memberikan informasi inti dari kumpulan data, serta melakukan deskripsi tentang angka-angka yang telah diolah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Hamzah & Susanti, 2021).

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai kondisi kebebasan ekonomi, penelitian ini mengacu pada data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) dan menganalisisnya secara deskriptif. Dan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai persepsi masyarakat, akan menggunakan angket yang didistribusikan secara daring dalam jangka waktu dua minggu selama periode 26 September 2022 hingga 10 Oktober 2022. Kemudian, angket yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk melihat kebebasan ekonomi adalah data sekunder yang bersumber dari lembaga atau instansi terutama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan

pengolahan data sederhana. Sedangkan, jenis data yang digunakan untuk melihat persepsi masyarakat mengenai kebebasan ekonomi adalah data primer dengan penyebaran angket/kuesioner. Sasaran responden yang diperlukan dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang berusia minimal 17 tahun.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data kondisi ekonomi maksimal dalam 6 bulan terakhir di tahun 2022. Sementara, data yang digunakan adalah data pada 5 tahun terakhir atau sejak tahun 2017 – 2022. Untuk pengambilan data persepsi masyarakat, disebarakan kuesioner selama tanggal 26 September 2022 – 10 Oktober 2022 dan perolehan data secara *random sampling* dan ditargetkan ke masyarakat yang memperoleh *link* angket.

Variabel yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan 5 indikator kebebasan ekonomi yang digagas oleh Gwartney (2018). Indikator tersebut diantaranya kapasitas pemerintah, regulasi yang memudahkan individu, penegakan hukum, perdagangan internasional, serta akses terhadap uang. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada poin kedua, menggunakan pertanyaan tertutup yang mewakili masing-masing indikator tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Gwartney, J. et al. (2018) menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi didefinisikan sebagai konsep kepemilikan diri, di mana individu memiliki hak untuk memilih dan memutuskan bagaimana menggunakan waktu dan bakat mereka untuk membentuk kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya, berdasarkan definisi tersebut, dibangun sebuah model komprehensif untuk mengukur indeks kebebasan berbagai negara, termasuk Indonesia.

Fraser Institute menggunakan 5 indikator kebebasan ekonomi sebagai acuan untuk membuat indeks kebebasan ekonomi bagi negara-negara di dunia (Fraser Institute, 2018). Diantaranya adalah kapasitas pemerintah, perlindungan hukum terhadap usaha, akses terhadap uang, perdagangan internasional, dan regulasi di pasar kredit dan pasar tenaga kerja.

Kapasitas Pemerintah

Kapasitas pemerintah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu konsumsi dan investasi pemerintah. Masih tingginya kontribusi pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) di ketiga wilayah tersebut menunjukkan bahwa pilihan politik lebih dominan daripada pilihan pribadi.

Menurut Samuelson (2004:125), konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir yang berguna untuk mendapatkan kepuasan maupun memenuhi kebutuhan. Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapa pun, tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dengan terpenuhinya berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder, sampai dengan kebutuhan tersier.

Lain halnya menurut Sukirno (1994:38) bahwa konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, membiayai jasa angkutan, membayar pendidik anak, membayar sewa rumah, dan membeli kendaraan.

Investasi pemerintah dalam hal ini merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk menanamkan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penggerak roda perekonomian. Semakin besar modal yang diberikan untuk BUMN, maka kapasitas pemerintah dinilai semakin besar jika disandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB dalam tulisan ini mencerminkan produktivitas masyarakat dan sekaligus perusahaan swasta secara keseluruhan.

Penegakan Hukum

Indikator ini mengukur peran hukum dalam melindungi hak milik individu. Fraser Institute berfokus pada pentingnya sistem hukum sebagai penentu kebebasan ekonomi. Perlindungan orang dan properti yang diperoleh secara sah adalah elemen sentral dari kebebasan ekonomi. Banyak yang berpendapat bahwa itu adalah fungsi pemerintahan yang paling penting. Bahan utama dari sistem hukum yang konsisten dengan kebebasan ekonomi adalah supremasi hukum, keamanan hak milik, peradilan yang independen dan tidak memihak, dan penegakan hukum yang tidak memihak dan efektif.

Pada bagian temuan, akan dipaparkan kondisi perlindungan hukum dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan penegakan hukum kontrak di Indonesia. Pada prinsipnya, kekayaan intelektual melindungi hak milik individu. Kekayaan intelektual diperlukan untuk memberikan keamanan dan insentif kepada setiap orang yang melakukan bisnis. Indonesia sendiri juga memiliki kerangka hukum untuk menjaga hak kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian hukum dan HAM, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi milik perseorangan maupun milik umum, termasuk hak

cipta dan kekayaan industri. Sedangkan untuk kepemilikan publik, ada aspek perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional dan Indikasi Geografis.

Akses Terhadap Uang

Indikator perolehan uang diukur dengan melihat kondisi jumlah uang beredar (JUB) dan tingkat inflasi. Uang Beredar adalah kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk). Kewajiban yang menjadi komponen Uang Beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR), uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun (BI, 2022).

Sedangkan indikator inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Inflasi sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Menurut ilmu ekonomi modern, terdapat dua jenis inflasi yang berbeda satu sama lain, yaitu inflasi karena dorongan biaya (*cost-push inflation*) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (*demand-pull inflation*) (BI, 2022).

Perdagangan Internasional

Indikator ini memberikan gambaran tentang aktivitas perdagangan internasional yang dapat berfungsi dengan baik ketika ada insentif dan berbagai regulasi untuk memfasilitasi individu. Dalam melihat kebebasan ekonomi dalam perdagangan internasional, menggunakan tarif ekspor impor dan arus modal asing.

Tarif ekspor dan impor merupakan salah satu penghambat perdagangan internasional dan akan berdampak pada aliran modal. Amanda dan Aslami (2022) menjelaskan terdapat tiga penghambat perdagangan internasional. Pertama, keamanan suatu negara, jika suatu negara tidak aman, pedagang akan meninggalkan negara dan pergi ke negara yang lebih aman. Kedua, kebijakan ekonomi internasional yang diberlakukan pemerintah seperti pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor/ekspor yang tinggi, dan perijinan yang berbelit. Ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing yang juga akan mengakibatkan ketidakstabilan neraca pembayaran dalam negeri.

Regulasi Pasar Kredit dan Pasar Tenaga Kerja

Berbagai regulasi yang memudahkan individu, seperti akses kredit pasar, pasar tenaga kerja dan regulasi bisnis. Regulasi yang memudahkan individu adalah berbagai kebijakan yang mendorong kebebasan individu dalam ekonomi. Diantaranya adalah dalam pasar tenaga kerja dan pasar uang.

Pasar tenaga kerja merupakan tempat bertemunya angkatan kerja dengan pelaku yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam hal ini, akan dimasukkan kondisi tingkat pengangguran terbuka tahun 2022. Sedangkan pasar uang dalam pembahasan akan menunjukkan bagaimana masyarakat dapat mengakses permodalan seperti kemudahan melakukan kredit.

Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat merupakan proses mengamati obyek melalui indera kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan melalui bentuk-bentuk rangsangan suatu obyek atau peristiwa berdasarkan latar belakang masing-masing individu, sehingga akan muncul tanggapan atau reaksi yang diwujudkan dalam bentuk kemampuan membedakan, mengelompokkan, menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, serta terwujudnya komunikasi antara manusia dengan obyek (Soelaeman, 2006).

Menurut Syahputra dan Rahmatsyah (2020) persepsi masyarakat adalah sebuah proses di mana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam penelitian ini, obyek yang ditentukan adalah variabel kebebasan ekonomi yang ditanyakan kepada masyarakat untuk melihat tanggapan ataupun reaksi masing-masing individu berdasarkan kondisi demografi yang berbeda-beda.

TEMUAN

Kapasitas Pemerintah

Sebagai dasar, analisis kapasitas pemerintah akan menggunakan tolok ukur yang melihat bahwa ketika kontribusi pemerintah terhadap PDB dalam hal konsumsi tinggi secara tidak proporsional, maka pilihan politik bisa dibilang lebih dominan daripada pilihan pribadi. Oleh karena itu, menarik untuk mencermati analisis ini guna memahami cakupan kapabilitas pemerintah dalam perekonomian Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2022.

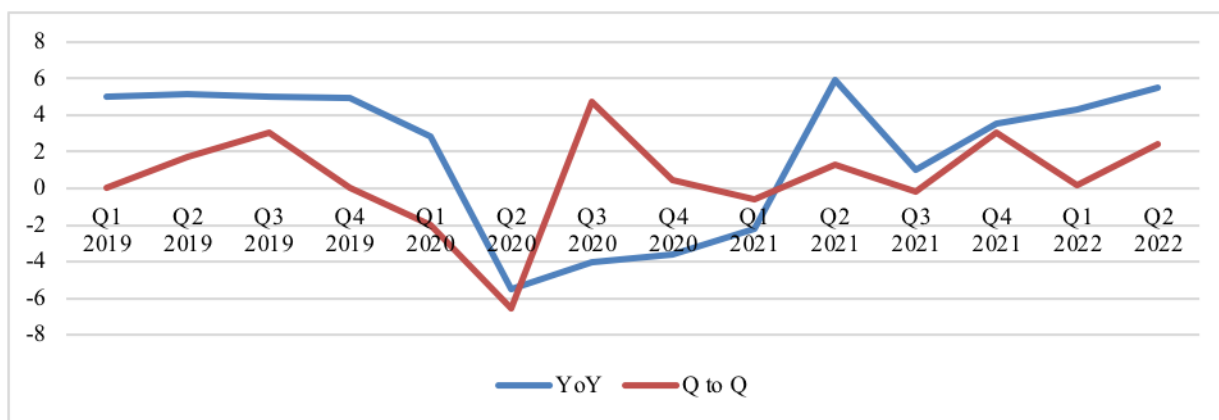
Pada laporan *Economic Freedom of the World: Annual report 2022* yang dirilis oleh Fraser Institute, Indonesia menduduki peringkat ke-25 dalam aspek kapasitas pemerintah (*size of government*). Dengan perolehan skor 7,91, Indonesia termasuk memiliki kebebasan ekonomi yang tinggi karena masuk di 50 besar negara dengan kapasitas pemerintah yang baik.

Konsumsi

Dalam berita resmi statistik, BPS menyebutkan bahwa pada triwulan 2-2022 secara *year-on-year* (yoy) ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,51 persen. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2-2022 juga menunjukkan bahwa distribusi konsumsi, khususnya konsumsi rumah tangga, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 51,47 persen.

Jika dibandingkan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi menurun dari 5,96 persen. Hal itu disebabkan oleh kondisi Covid-19 yang masih tinggi dan pembatasan mobilitas masyarakat masih diberlakukan. Namun, apabila dilihat secara *quartal-to-quartal* (q-to-q) menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi yang diupayakan baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Grafik 1. Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat pada Triwulan II-2022



Sumber: BPS (2022) diolah oleh Databoks.

Berdasarkan Grafik 1, konsumsi rumah tangga menjadi kunci kekuatan ekonomi Indonesia hingga saat ini. Setelah pandemi yang memporak-porandakan perekonomian pada triwulan II-2020, konsumsi rumah tangga merupakan hal yang mampu mendorong kembali kekuatan ekonomi dengan distribusi di atas 50 persen.

Apabila dirinci, PDB ekonomi Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp4,92 triliun pada kuartal II 2022. Di antaranya, konsumsi rumah tangga menyumbang Rp2,53 triliun (51,47 persen) dari total PDB negara.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga nasional pada triwulan II 2022 meningkat sebesar 2,42 persen dibandingkan triwulan I 2022 (triwulan/triwulan ke triwulan). Konsumsi rumah tangga juga meningkat sebesar 5,51 persen (yoy) dibandingkan dengan Q2 2021.

Bantuan sosial yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil mendukung konsumsi kelas bawah. Aktivitas belanja kelas menengah juga mendukung konsumsi rumah tangga, terutama saat Ramadhan dan Idul Fitri. Kontribusi konsumsi rumah tangga yang menunjukkan keterlibatan individu ternyata menunjukkan peran yang penting dalam PDB dibandingkan pilihan politik. Hal ini baik mengingat perekonomian terus mengalami penyesuaian dengan kondisi global.

Investasi Pemerintah

Pada bagian ini, kami mengkaji kapasitas pemerintah dalam hal investasi dengan membandingkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PDB. Menurut prinsip kebebasan ekonomi, semakin besar porsi aset BUMN dalam PDB berarti semakin sedikit ruang bagi sektor swasta untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, dan sebaliknya.

Tabel 1. Perbandingan Aset BUMN dengan PDB 2017-2021 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Aset BUMN	PDB ADHB	Rasio
2017	7210	13588,8	0.53
2018	8092	14837,4	0.55
2019	8725	15833,9	0.55
2020	8312	15438,0	0.54
2021	8978	16970,8	0.53

Sumber: BPS dan berbagai sumber, 2022.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa aset BUMN secara umum selalu mengalami peningkatan begitu juga dengan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB). Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan aset BUMN dari tahun sebelumnya, begitu juga dengan kondisi PDB. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi Covid-19 yang melanda selama tahun 2020, serta belum banyaknya penanganan yang dilakukan. Kemudian, di tahun 2021, aset sudah mengalami peningkatan menjadi Rp8.978 triliun.

Secara umum, dari data tersebut dapat dilihat bahwa rasio aset BUMN terhadap PDB rata-rata sebesar 50 persen. Angka tersebut tergolong moderat dalam hal mendominasi pasar. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia masih membuka kesempatan bagi swasta untuk memasuki pasar. Pemerintah hanya mengawasi dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut

juga dapat diketahui melalui data penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Kementerian Penanaman Modal/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp302,2 triliun pada kuartal kedua tahun 2022, level tertinggi dalam satu dekade terakhir. Menurut data BPKM, akan mencapai peningkatan 7 persen dibandingkan kuartal pertama tahun 2022 (*q-to-q*) dan peningkatan 35 persen dibandingkan kuartal kedua tahun 2021 (*y-on-y*).

Lebih rinci, pada triwulan II 2022 realisasi PMDN mencapai Rp139 triliun, meningkat 2,8 persen triwulanan (*q-to-q*) dan secara *y-on-y* meningkat 30,8 persen. Sementara, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 163,2 triliun pada periode yang sama. Angka tersebut juga naik 10,8 persen (*q-to-q*) dan 39,7 persen (*y-on-y*). Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, pertumbuhan yang dicapai FDI cukup tinggi karena Indonesia masih dianggap sebagai tujuan investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Penegakan Hukum

Salah satu aspek yang digunakan dalam indikator kebebasan ekonomi dalam bidang penegakkan hukum adalah HKI. HKI merupakan salah satu aspek fundamental dari pembangunan berkelanjutan suatu perusahaan. Menurut DJKI Kemenkumham, antara 2019 dan 2021, hanya 76.294 perusahaan yang mengajukan pendaftaran kekayaan intelektual. Padahal, jumlah UMKM di Indonesia sekitar 65,4 juta, artinya baru 11 persen yang sudah memiliki kekayaan intelektual. Ini karena sedikit orang yang menyadari pentingnya kekayaan intelektual ([merdeka.com](https://www.merdeka.com), 1/8/2022). Dengan demikian, Indonesia belum cukup serius dalam penegakan hukum pada aspek kebebasan ekonomi.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hedyanto, Raisah, dan Lumbanraja (2016) yang menyebutkan ada sederet kendala dalam regulasi pemegang paten oleh investor asing di Indonesia. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 menimbulkan permasalahan terutama untuk investor dari luar negeri. Hal ini juga membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan Permenkumham Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten sebagai solusi atas permasalahan tersebut melalui Kementerian Hukum dan HAM, di mana Pemegang paten dapat menyampaikan permohonan penundaan pelaksanaan paten kepada Menteri beserta latar belakang atas penundaan tersebut, dalam hal pemegang paten belum mampu untuk menerapkan patennya di Indonesia setelah permohonan paten tersebut disetujui.

Dari segi komitmen menjalankan kontrak, kita dapat melihat proses pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang dalam proses pencarian investor oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Salah satu skema pembiayaan pembangunan IKN selain memakai APBN adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, hal itu mendapatkan sejumlah tantangan dalam implementasi skema diantaranya kesiapan proyek yang ditawarkan pemerintah, ketepatan alokasi risiko antara pemerintah dengan badan usaha, dan komitmen pemerintah untuk menjalankan proyek ini. (konstruksimedia.com, 3/11/2022).

Apabila disandingkan dengan hasil indikator Laporan Tahunan Fraser Institute dalam aspek *legal system and Property Rights*, Indonesia menduduki peringkat 102 dengan skor rendah yaitu 4,9. Hal tersebut senada dengan temuan penelitian ini bahwa Indonesia perlu meningkatkan sosialisasi dalam pengajuan hak paten untuk perlindungan hukum UKM di Indonesia dan perlu menyiapkan proyek dengan memperhitungkan identifikasi risiko agar mendapat kepercayaan dari badan usaha untuk berinvestasi.

Akses Terhadap Uang

Akses terhadap uang berkaitan dengan aspek kebebasan finansial. Ketika individu memiliki akses yang lebih bebas terhadap uang, mereka akan dapat menilai dan memilih kebutuhan mereka sendiri dari uang yang mereka miliki. Dalam hal ini, akses terhadap uang akan dilihat dari jumlah uang beredar dan kondisi inflasi di Indonesia pada tahun 2022.

Secara umum, iklim keuangan Indonesia juga sudah dilengkapi dengan infrastruktur keuangan yang baik. Sehingga, jumlah uang beredar dan inflasi masih dapat diatasi dan dikendalikan. Senada dengan temuan Fraser Institute tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke 22 dengan skor 9,6 dalam perhitungan indeks kebebasan ekonomi.

Jumlah Uang Beredar (JUB)

Bank Indonesia (BI) melaporkan uang beredar dalam arti luar (M2) mencapai Rp7.846,5 triliun sepanjang bulan Juli 2022. Jumlah itu tumbuh 9,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (*y-on-y*). Berdasarkan komponennya, peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) sebesar 14,9 persen (*y-on-y*) dan uang kuasi sebesar 3,2 persen (*y-on-y*). Selain itu, komponen surat berharga selain saham juga tumbuh 12,3 persen (*y-on-y*) pada periode sama.

Pertumbuhan uang beredar itu juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penyaluran kredit dan perkembangan keuangan Pemerintah, serta aktiva luar negeri bersih. Pada bulan Juli 2022, penyaluran kredit tumbuh 10,5 persen (*y-on-y*) setelah bulan sebelumnya tumbuh 10,4 persen (*y-on-y*). Pertumbuhan ini sejalan dengan penguatan peyaluran kredit produktif maupun konsumtif.

Di sisi lain, pada bulan September tahun 2022, pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik subsidi maupun non-subsidi. Hal tersebut memicu kenaikan inflasi di masa depan karena memberikan efek domino ke harga barang lain terutama dalam pendistribusian dan mobilisasi. Untuk mengatasi hal itu, BI telah menaikkan suku bunga acuan yang akan menyebabkan penurunan jumlah uang yang beredar (Maria et. al., 2017).

Inflasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, inflasi bulan September 2022 sebesar 1,17 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,87. Dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,16 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,35 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,57 persen; kelompok transportasi sebesar 8,88 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,31 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,21 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,57 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,28 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,30 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.

Penelitian [Putra \(2022\)](#) menyebutkan secara simultan, variabel suku bunga, jumlah uang beredar, dan nilai tukar tidak memiliki pengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Dalam jangka pendek, variabel suku bunga terhadap inflasi menunjukkan hubungan yang positif tidak signifikan, sedangkan dalam jangka panjang menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap inflasi di Indonesia pada tahun 2015-2020. Dalam jangka pendek dan jangka panjang, variabel jumlah uang beredar terhadap inflasi menunjukkan hubungan negative tidak signifikan pada tahun 2015-2020. Dalam jangka pendek variabel nilai tukar terhadap inflasi menunjukkan hubungan yang positif tidak signifikan, sedangkan dalam jangka panjang variabel nilai tukar menunjukkan tidak mempunyai pengaruh terhadap inflasi di Indonesia pada tahun 2015-2020.

Perdagangan Internasional

Indikator kebebasan ekonomi adalah pergerakan bebas barang dan jasa lintas batas, yang dikenal sebagai perdagangan bebas. Pada bagian ini, kebebasan perdagangan internasional diukur dengan menggunakan dua indikator utama: tarif impor/ekspor dan arus modal asing.

Perdagangan internasional adalah bagian yang sangat penting dari perekonomian Indonesia. Sepanjang tahun 2021, nilai ekspor berkontribusi sebesar 21,6 persen PDB dan impor

mencapai 18,9 persen dari PDB. Pemerintah berupaya mendorong kelancaran perdagangan internasional dengan berbagai kebijakan yang secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhinya.

Salah satu kebijakan yang langsung berpengaruh adalah kebijakan fiskal yaitu bea, di mana diberlakukan tarif tertentu terhadap barang yang diekspor atau diimpor. Di tengah pandemi, kebijakan bea sangat penting untuk memperlancar arus barang terkait penanganan pandemi seperti alat kesehatan untuk mendukung daerah 3T (tertinggal, terpencil, dan terluar) serta vaksin. Pemerintah Indonesia telah memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pembebasan kepabeanan dan/atau, cukai, serta perpajakan atas impor. Di tahun 2021, realisasi insentif pajak mencapai 10,28 persen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sebelum memasuki pembahasan, *Annual Report Economic Freedom* Tahun 2022 dari Fraser Institute memberikan peringkat ke-86 kepada Indonesia dalam aspek kebebasan untuk perdagangan. Hal tersebut masih relevan dengan kondisi perdagangan internasional Indonesia di tahun 2022 ini.

Tarif Impor-Ekspor

Kondisi hambatan perdagangan yang dialami Indonesia sejak awal tahun 2022 mengalami hal yang rumit karena konflik Rusia dan Ukraina. Hal itu menyebabkan gejolak harga minyak dunia mengalami fluktuasi. Selain itu, permintaan kebutuhan untuk energi yang berkelanjutan juga menyebabkan peningkatan permintaan *crude palm oil* (CPO). Hal itu tentunya berakibat pada persediaan minyak sawit untuk pangan, sehingga membuat harga minyak goreng kemasan mengalami lonjakan.

Berdasarkan data Berita Resmi Statistik oleh BPS, harga minyak goreng kemasan mengalami lonjakan pada bulan Februari dengan harga Rp18.700/liter dan puncaknya ada di bulan Mei 2022 dengan harga Rp22.500/liter. Begitu pula dengan minyak curah yang mengalami lonjakan pada bulan April 2022 dengan harga Rp19.000/kg

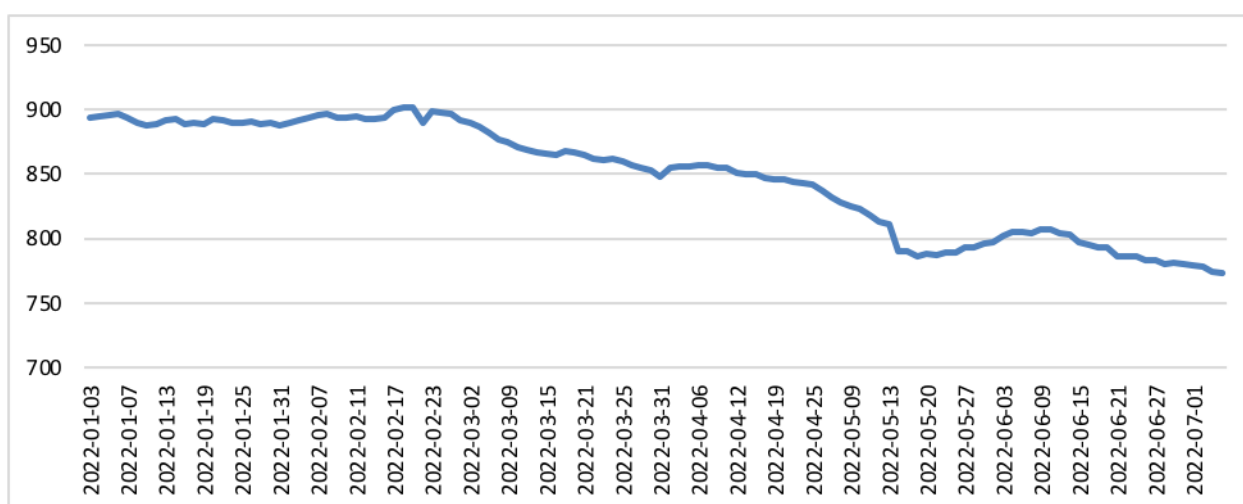
Untuk mengatasi lonjakan tersebut, pemerintah membuat larangan ekspor CPO yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil* pada 27 April 2022. Peraturan ini menimbulkan penolakan dari petani sawit karena menyebabkan kerugian. Selain itu, bagi industri juga mengakibatkan penumpukan penyimpanan tandan buah sawit. Akibatnya, nilai tukar petani sawit juga turun drastis.

Lebih lanjut, pemerintah telah mengimplementasikan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022 pada 1 April 2022. BTKI sendiri juga memuat struktur bea masuk, bea keluar dan pajak dalam rangka impor, yang digunakan sebagai salah satu dasar kebijakan fiskal dan non-fiskal, termasuk ketentuan larangan pembatasan, statistik, origin dan kepentingan lainnya. Pemilihan besaran tarif tersebut berdasarkan usulan K/L Pembina Sektor. Oleh karena itu, beberapa peraturan turunan terkait perpajakan akan menyesuaikan dengan ketentuan dalam BTKI, seperti peraturan terkait Free Trade Agreement (FTA), Bea Keluar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22. Pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan K/L lain dalam perumusan peraturan terkait, sehingga regulasi antar K/L selaras dan semakin memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan perdagangannya ([Kemenkeu](#), 01/04/2022).

Arus Modal Asing

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia telah kehilangan modal asing sekitar Rp120 triliun dalam enam bulan belakangan. Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), pada 3 Januari 2022, kepemilikan asing/non-residen dalam SBN rupiah yang dapat diperdagangkan masih sebesar Rp893,6 triliun. Namun, sejak penghujung bulan Februari 2022, tepat setelah Rusia memulai invasi ke Ukraina, tren kepemilikannya terus berkurang seperti terlihat pada grafik 2, hingga pada 6 Juli 2022 nilainya tinggal Rp773,12 triliun.

Grafik 2. Nilai Kepemilikan Asing dalam SBN (3 Januari-6 Juli 2022)



Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 2022.

Menurut Danareksa Research Institute, tren penurunan kepemilikan asing di SBN sudah terjadi sejak awal pandemi tahun 2020. Kemudian sepanjang semester pertama 2022 penurunan terus berlanjut karena dipengaruhi konflik geopolitik, yang kemudian berdampak pula pada gejolak ekonomi di skala global.

Dalam laporan Ketidakpastian Ekonomi Global dan Peluang Ekonomi Domestik yang dirilis pada hari Senin (11/7/2022), Danareksa Research Institute memperkirakan tren keluarnya modal asing dari pasar SBN ini akan terus terjadi dalam beberapa waktu mendatang. *Capital outflow* dari pasar SBN diperkirakan akan berlanjut, karena sentimen kenaikan *Federal Fund Rate* (FFR) yang diperkirakan akan terjadi sebanyak tujuh kali pada tahun 2022 dan lima kali pada tahun 2023.

Danareksa juga menyatakan ada sejumlah faktor lain yang bakal mempengaruhi *capital outflow*, yakni sentimen kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa dan sentimen kenaikan suku bunga global. Di tengah potensi *capital outflow*, nilai tukar rupiah diperkirakan melemah, tetapi dengan volatilitas yang terjaga. Hal ini tidak lepas dari semakin berkurangnya porsi asing pada kepemilikan SBN.

Indikator terakhir adalah regulasi yang memudahkan individu. Hal ini penting untuk dibahas karena kebebasan ekonomi berpatokan bahwa regulasi yang tersedia sudah seharusnya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

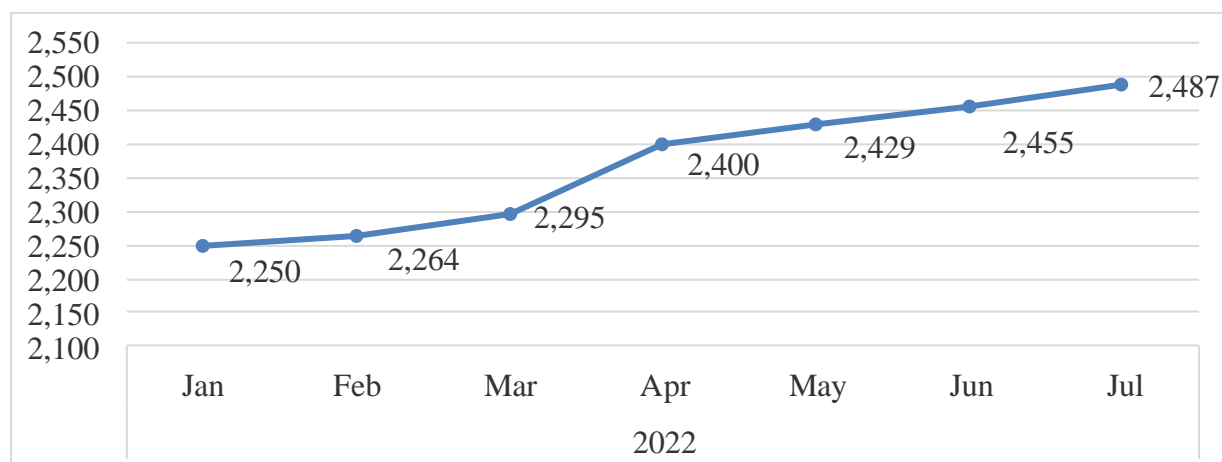
Regulasi dalam Pasar Kredit dan Pasar Tenaga Kerja

Aspek terakhir yaitu mengenai kondisi pasar kredit dan pasar tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan laporan dari Fraser Institute 2022, aspek regulasi pasar kredit dan tenaga kerja Indonesia menduduki peringkat terendah dari lima indikator kebebasan ekonomi. Indonesia berada di peringkat ke-123 dengan skor 6,5. Artinya, masih buruknya penyaluran kredit ke masyarakat dan penanganan dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Rendahnya penyaluran kredit untuk masyarakat tidak sebanding dengan peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebagaimana grafik berikut ini.

Pasar Kredit

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang pasar kredit perbankan di Indonesia selama tahun 2022. Sebagaimana teori moneter menyebutkan bahwa perbankan merupakan peran yang penting bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh perannya sebagai lembaga intermediasi. Artinya, peran perbankan sebagai menghimpun dana dari orang-orang yang memiliki kelebihan dana yang kemudian disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Grafik 3. Dana Pihak Ketiga (Januari-Juli 2022)



Sumber: Bank Indonesia, 2022.

Berdasarkan Grafik 3, dapat diketahui bahwa hingga bulan Juli 2022, DPK selalu mengalami peningkatan. Bank Indonesia melaporkan bahwa jumlah rekening DPK perbankan mencapai 2.487 per 1.000 penduduk dewasa pada bulan Juli. Jumlah tersebut lebih tinggi 1,3 persen dari bulan sebelumnya.

Peningkatan tingkat rekening DPK perbankan terus menunjukkan tanda-tanda perbaikan akses terhadap layanan keuangan dari bank. Seiring dengan tren digitalisasi, beberapa bank mempermudah proses membuka rekening dengan menggunakan layanan perbankan seluler.

Jumlah rekening kredit perbankan juga meningkat ke-627 per 1.000 penduduk dewasa pada bulan Juli dari 598 pada bulan sebelumnya. Peningkatan juga terjadi meskipun tidak signifikan pada data kredit UMKM terhadap total kredit perbankan, yaitu 20,92 persen setelah sebelumnya di angka 20,83 persen.

Kondisi yang disebutkan dalam Statistik Sistem Keuangan bulan September 2022 itu merupakan gambaran dari pasar kredit yang kondusif dalam mendukung kebebasan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, akan membahas tentang kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia dengan variabel menggunakan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Pasar Tenaga Kerja

Kondisi pasar tenaga kerja yang baik dalam penilaian kebebasan ekonomi pada bagian ini menggunakan data tingkat pengangguran terbuka. Jumlah pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kebebasan ekonomi yang luas karena tidak mampu menyediakan akses untuk bekerja bagi masyarakatnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2022 sebesar 5,83 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sekitar 5 sampai 6 orang penganggur. Apabila dibandingkan dengan kondisi bulan Februari 2021 dan Agustus 2021, TPT pada bulan Februari 2022 mengalami penurunan berturut-turut sebesar 0,43 persen poin dan 0,66 persen poin (BPS, 2022)

Berdasarkan hasil Sakernas bulan Februari 2022, TPT tertinggi terdapat pada pendidikan tingkat menengah (SMA Umum dan Kejuruan), yaitu sebesar 9,16 persen. Dapat dikatakan bahwa terdapat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada lulusan pendidikan tingkat menengah. Sementara mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja yang dapat dilihat dari TPT penduduk yang tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah yang relatif lebih rendah (1,11 persen).

Di samping itu, Sakernas bulan Februari 2022 menunjukkan bahwa TPT penduduk kelompok umur muda mencapai 17,08 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15-24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 17 orang yang menganggur. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,95 persen poin bila dibandingkan dengan angka di bulan Februari 2021 dan turun 2,47 persen poin dibandingkan angka di bulan Agustus 2021.

Berdasarkan data yang telah disebutkan dalam indikator pasar tenaga kerja Indonesia, dapat dikatakan bahwa regulasi yang dibuat pemerintah selama ini cukup membantu dalam memperoleh pekerjaan bagi masyarakat. Hal tersebut terlihat dari adanya penurunan TPT tahun 2022. Namun, hal tersebut tidak signifikan karena bayang-bayang akibat pandemi masih dirasakan hingga akhir tahun 2022.

Data kebebasan ekonomi yang telah dipaparkan kemudian akan disesuaikan dengan persepsi masyarakat mengenai kondisi yang ada. Sebagaimana definisi persepsi masyarakat, penelitian ini meminta keterangan tentang apa yang dirasakan masyarakat selama ini tentang kebebasan ekonomi di Indonesia. Persepsi masyarakat berikut ini merupakan bentuk validasi sederhana bagi kebijakan yang telah berlaku.

Persepsi Masyarakat tentang Kebebasan Ekonomi

Pembahasan berikut ini menampilkan persepsi masyarakat mengenai kondisi kebebasan ekonomi saat ini. Pada proses pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 2 hingga 14 Oktober 2022 dengan metode *snowballing*.

Tabel 2. Kondisi Demografi Responden

Variabel	Jawaban	n	% (N=62)
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa	13	21
	Dosen/Peneliti	13	21
	Karyawan Swasta	17	27
	Pengusaha	4	6
	Lainnya	15	24
Usia	19-30	46	74
	31-40	9	15
	41-70	7	11
Jenis Kelamin	Laki-laki	33	53
	Perempuan	29	47

Sumber: Data Primer, 2022.



Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa komposisi responden yang diperoleh dan mengisi angket sebanyak 62 orang. Mayoritas responden (27 persen) bekerja sebagai karyawan swasta, 21 persen sebagai pelajar/mahasiswa, 21 persen sebagai dosen/peneliti, 6 persen sebagai pengusaha, dan 24 persen mengisi lainnya.

Jika dilihat berdasarkan usia, mayoritas responden berusia produktif, yaitu 19-30 tahun atau sejumlah 74 persen responden. Sebanyak 53 persen responden berjenis kelamin laki-laki, dan 47 persen diantaranya berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan angket yang telah dibagikan, sebanyak 52 persen responden menjawab bahwa aspek regulasi pasar kredit dan pasar tenaga kerja belum menunjukkan kebebasan ekonomi. Hal tersebut juga sesuai dengan indeks kebebasan ekonomi dari Fraser Institute dalam Annual Report tahun 2022 dengan peringkat ke-123. Selanjutnya, akan dibahas satu per satu jawaban berdasarkan pertanyaan angket dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Angket Persepsi Masyarakat terhadap Kebebasan Ekonomi di Indonesia

Pertanyaan	Chart	Keterangan
Menurut Anda, apakah kapasitas pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi daripada kapasitas swasta? (Misalnya: perusahaan milik negara (BUMN) lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daripada perusahaan swasta/asing)	<p>■ Ya ■ Tidak ■ Tidak tahu</p>	Sebanyak 31 responden, atau sebanyak 50 persen diantaranya menjawab bahwa pemerintah tidak terlalu mendominasi perekonomian Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa swasta memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sebagaimana data hasil temuan dalam penelitian ini.
Menurut Anda, apakah pemerintah sudah melakukan penegakan hukum untuk melindungi hak milik individu? (Misalnya: memberikan perlindungan hukum untuk hak cipta, hak paten, hak merek secara maksimal)	<p>■ Sudah ■ Belum ■ Tidak tahu</p>	Sebanyak 29 responden, atau 47 persen diantaranya mengaku bahwa pemerintah sudah melakukan penegakan hukum dalam rangka melindungi hak individu. Namun, 44 persen responden juga berpendapat bahwa pemerintah belum melakukannya. Hal ini memperkuat temuan penelitian bahwa belum maksimalnya sosialisasi mengenai HKI bagi keberlangsungan bisnis.
Menurut Anda, selama 1 tahun terakhir ini apakah pemerintah sudah menjamin kebebasan finansial dalam mengakses uang? (Misalnya, dengan menjaga jumlah uang beredar (JUB) dan inflasi dengan baik)	<p>■ Sudah ■ Belum ■ Tidak tahu</p>	Sebanyak 42 persen responden menjawab pemerintah sudah menjamin kebebasan finansial terutama dalam pengendalian jumlah uang beredar dan inflasi. Responden yang menjawab 'belum' sebanyak 20 orang, atau 32 persen. Namun, yang menjawab "tidak tahu" juga ada 16 responden. Hal ini menunjukkan bahwa literasi

Pertanyaan	Chart	Keterangan
		keuangan, terutama bidang moneter masih minim dan hanya diketahui bagi segelintir orang saja.
Menurut Anda, dalam satu tahun terakhir apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah mendukung transaksi perdagangan internasional? (Misalnya: dalam hal tarif ekspor-impor dan arus modal asing)		Sebanyak 33 responden atau 53 persen menjawab bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah telah mendukung transaksi perdagangan internasional. Namun, 31 persen diantaranya menjawab "tidak tahu". Salah satunya dipengaruhi oleh demografi responden pengisi angket yang beragam.
Menurut Anda, apakah kebijakan pemerintah dalam setahun terakhir ini sudah memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit sehingga mengurangi pengangguran?		Sebanyak 52 persen dari keseluruhan responden menjawab pemerintah belum memberikan kemudahan dalam menyalurkan kreditnya dan belum mengurangi pengangguran.

Sumber: Data primer, 2022.

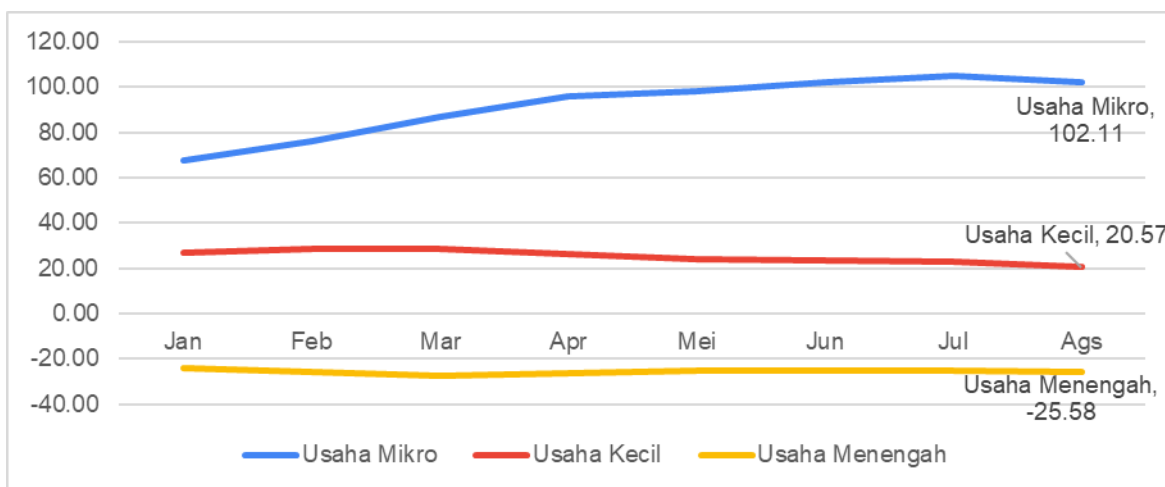
Dapat diketahui bahwa hasil angket persepsi masyarakat memberikan jawaban nyata dan memvalidasi kondisi data dan temuan dalam penelitian. Begitu pula dalam hasil perhitungan indeks kebebasan ekonomi yang dikeluarkan oleh Fraser Institute. Baik dalam hasil temuan penelitian, persepsi masyarakat, dan indeks kebebasan ekonomi, semuanya menjawab bahwa regulasi dalam pasar kredit dan pasar tenaga kerja masih jauh dari kebebasan.

Bagian selanjutnya memaparkan data mengenai kondisi kredit UKM Indonesia berdasarkan skala usaha. Hal ini penting untuk memberikan gambaran mengenai iklim usaha untuk memperoleh kredit selama pemulihan ekonomi tahun 2022 ini.

Kondisi Kredit UKM Indonesia berdasarkan Skala Usaha

Salah satu indikator dalam kebebasan ekonomi adalah kemudahan untuk melakukan bisnis pada aspek regulasi yang memudahkan individunya. UMKM merupakan penyangga dalam membantu pemulihan ekonomi pasca krisis sehingga perlu memastikan bahwa kemudahan dalam melakukan kredit perlu diperhatikan. Semakin mudah dalam mengajukan kredit bagi UMKM, maka akan lebih cepat pemulihannya dan semakin tinggi kebebasan ekonomi suatu negara.

Grafik 4. Pertumbuhan Kredit UMKM



Sumber: SSKI Oktober BI, 2022.

Berdasarkan Grafik 4, menunjukkan pertumbuhan kredit berdasarkan skala usahanya. Hingga bulan Agustus 2022, kredit usaha mikro tumbuh 102,11 persen secara *y-on-y*. Namun, angka tersebut lebih rendah atau turun dari bulan Juli 2022, yang tumbuh sebesar 105,33 persen secara *y-on-y*. Begitu pula pada pertumbuhan kredit usaha kecil di bulan Agustus sebesar 20,57 persen secara *y-on-y* dan terus menurun sejak bulan Mei 2022.

Berdasarkan jenis penggunaan kredit, pertumbuhan kredit UMKM sebesar 20,21 persen umumnya digunakan untuk modal kerja. Dan dilihat dari sektor penerima kredit, sektor pertumbuhan yang terbesar ada pada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan yang telah disampaikan, dapat dilihat bahwa sesuai dengan peringkat kebebasan ekonomi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Fraser Institute tahun 2022, kebebasan ekonomi di Indonesia masih tergolong moderat. Dari kelima indikator di atas, data-

data yang ada menunjukkan bahwa indikator kapasitas pemerintah, akses terhadap uang, dan perdagangan internasional cukup baik di Indonesia. Ada tantangan pada indikator penegakan hukum dan regulasi yang memudahkan akses individu terutama pasar kredit dan pasar tenaga kerja yang masih perlu dibenahi.

Rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam meminimalisir kapasitas pemerintah adalah dengan mendorong kontribusi rumah tangga dalam mempertahankan daya beli masyarakat. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh kerjasama lembaga/instansi Kementerian Keuangan yang diorganisir oleh Kemenko Perekonomian untuk meningkatkan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan dalam rangka resiliensi ekonomi Indonesia. Dan peningkatan keterlibatan dan investasi swasta juga tidak kalah penting. Salah satunya yaitu dengan memudahkan investor untuk menanamkan modal oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Pada aspek peningkatan hak paten dan pengajuan HKI, yang perlu dilakukan Kemenkumham bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM adalah meningkatkan literasi pentingnya mendaftarkan merek dagang. Penegakan hukum untuk memberantas pungutan liar dalam pengajuan HKI juga penting dilakukan.

Lebih lanjut, pada aspek kebebasan ekonomi dalam akses terhadap uang, peningkatan literasi bagi masyarakat masih menjadi agenda besar agar meminimalisir *gap* antara literasi dengan infrastruktur keuangan. Kemudian, iklim moneter juga perlu tetap dijaga, seperti stabilisasi nilai tukar rupiah dan inflasi yang selama ini dilakukan oleh BI. Tentunya dengan kondisi yang terjadi dalam perekonomian global di tengah ancaman resesi negara maju, hal ini menjadi tantangan khusus dalam penjagaan ekonomi dalam negeri agar tidak ikut jatuh.

Kemudian, untuk menjaga aspek perdagangan internasional agar tetap kondusif, pemerintah perlu mengurangi kebijakan larangan ekspor/impur yang dapat membuat gejolak harga dalam negeri. Dalam hal ini, masih menjadi tugas BI bersama dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga neraca pembayaran Indonesia.

Selanjutnya, pada kondisi regulasi pasar kredit dan pasar tenaga kerja juga perlu ditingkatkan. Kementerian/Lembaga keuangan harus menjaga kekompakan dalam peningkatan literasi keuangan demi mengurangi *gap* dengan infrastruktur keuangan yang ada. Apabila literasi masyarakat sudah berangsur membaik, maka akan meningkatkan manajemen keuangannya dalam menjalankan usaha dan menggunakan kredit.

Pada sisi ketenagakerjaan, peran Kementerian Ketenagakerjaan tentunya penting untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Bantuan subsidi upah dan program kartu prakerja masih sangat dibutuhkan demi mempertahankan keberlangsungan pemulihan ekonomi nasional yang bersamaan dengan ketidakpastian global.

Terakhir, terkait dengan persepsi masyarakat, Kementerian Koperasi dan UKM perlu meningkatkan akses dalam perolehan kredit. Hal ini penting karena selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi, peningkatan akses kredit juga dapat mengurangi angka tingkat pengangguran Indonesia. Hal ini juga harus dibarengi dengan pengawasannya agar tidak hanya memberikan kredit, tetapi juga evaluasinya harus dipastikan berjalan dengan baik untuk menghindari gagal bayar yang berujung pada resesi.

REFERENSI

Buku

Hamzah, A., & Susanti, M. D. L. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kajian Teoretik & Praktik Dilengkapi Desain, Proses, dan Hasil Penelitian*. CV Literasi Nusantara Abadi.

Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi, Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers.

Soelaeman, M. (2009). *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal dan Laporan

Amanda, N. S., & Aslami, N. (2022). Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional. *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, 4(1), 14-23.

Badan Pusat Statistik (2022). Berita Resmi Statistik, edisi Agustus 2022. Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik (2022). Berita Resmi Statistik, edisi September 2022. Jakarta: BPS

Bank Indonesia (2022). Statistika Sistem Keuangan Indonesia bulan Oktober 2022. Jakarta: BI

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2022). Proporsi Kepemilikan Asing dalam SBN Rupiah yang Dapat Diperdagangkan edisi Juli 2022, Jakarta: Kementerian Keuangan.

Fraser Institute. (2018). "Economic Freedom of the World 2018 Annual Report". Vancouver: Fraser Institute.

Fraser Institute. (2020). "Economic Freedom of the World 2020 Annual Report". Vancouver: Fraser Institute.

Fraser Institute. (2021). "Economic Freedom of the World 2021 Annual Report". Vancouver: Fraser Institute.

Gwartney, J., R. Lawson, J. Hall, dan R. Murphy. (2018). *Economic Freedom of the World: 2018 Annual Report*. Vancouver: Fraser Institute.

Herritage Foundation. (2019). "2019 Index of Freedom". Diakses pada 16 September 2020. <https://www.heritage.org/index/ranking>.

Herritage Foundation. (2020). "2020 Index of Freedom". Diakses pada 16 September 2020".
<https://www.heritage.org/index/ranking>.

Herritage Foundation. (2021). "2021 Index of Freedom". Diakses pada 16 September 2020".
<https://www.heritage.org/index/ranking>.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (2017). Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2017.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (2018). Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2018.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (2019). Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2019.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (2020). Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2020.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (2021). Laporan Kinerja Kementerian BUMN 2021.

Manorek, C. R., Kawulur, A. F., & Rumagit, M. C. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Masyarakat Petani Kelapa Terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Equilibrium Unima*, 2(3).

Maria, J. A., Sedana, I. B. P., & Artini, L. G. S. (2017). "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi Dan Pertumbuhan Gross Domestic Product Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Timor-Leste". *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(10), 3477-3514.

Putra, N. Y. (2022). "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Tahun 2015-2020". *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(5), 195-212.

Suparyati, A. (2014). "Dampak Kebebasan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi". *Media Ekonomi*, 22(3), 221-240.

Syahputra, A., & Putra, H. R. (2020). "Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)". *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 1-20.

Wulandari, D. (2011). Analisis Pengaruh Kebebasan Ekonomi dan Variabel Moneter terhadap Harga Saham di Lima Negara ASEAN (Disertasi Doktorat, Universitas Brawijaya).

Internet

Ahdiat, Adi. (2022). "Pasar SBN Kehilangan Modal Asing Rp120 Triliun dalam 6 Bulan". Diakses pada 14 Oktober 2022, pukul 13.00 WIB,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/11/pasar-sbn-kehilangan-modal-asing-rp120-triliun-dalam-6-bulan>

Azzura, Siti Nur. (2022). "Menengok Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual untuk Keberlanjutan Bisnis". Diakses pada 9 September 2022, pukul 14.00 WIB, <https://www.merdeka.com/uang/menengok-pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-untuk-keberlanjutan-bisnis.html>

Firdaus, Riyan Galuh. (2022) "Konsultan Sebut Pembiayaan KPBU Masih hadapi Sejumlah Tantangan". Diakses 9 November 2022, pukul 10.00 WIB, <https://konstruksimedia.com/konsultan-sebut-pembiayaan-kpbu-masih-hadapi-sejumlah-tantangan/>

Joseph. (2022). "Indonesia masuk 15 besar negara terancam resesi versi Bloomberg, IMF wanti-wanti prospek ekonomi global kian 'gelap'". Diakses pada 12 Agustus 2022, pukul 16.30 WIB, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62161110>.

Kementerian Keuangan (2022). Badan Kebijakan Fiskal: Ingin Ekspor Impor Semakin Lancar, Pemerintah Menerbitkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022. Diakses pada Kamis, 3 November 2022 Pukul 10.00 WIB, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/04/01/4345-ingin-ekspor-impor-semakin-lancar-pemerintah-menerbitkan-buku-tarif-kepabeanan-indonesia-2022>

PROFIL PENULIS

NURI RESTI CHAYYANI

Peneliti Bidang Ekonomi



Nuri Resti Chayyani (Nuri) adalah alumni S1 Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung, yang lulus tahun 2018. Nuri menuntaskan program magister di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2020. Nuri bergabung sebagai Peneliti Bidang Ekonomi pada The Indonesian Institute pada tahun 2021. Sebelumnya, Nuri memiliki pengalaman menjadi asisten dosen pada mata kuliah Evaluasi Proyek selama dua semester.

Nuri memiliki beberapa pengalaman penelitian, diantaranya tentang strategi ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Pringsewu Lampung, dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Fokus kajian yang diminati Nuri adalah perencanaan pembangunan wilayah, dan keuangan daerah.

PROFIL THE INDOONESIAN INSTITUTE

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum, Policy Talks, dan Initiative!).

**Jl. HOS Cokroaminoto No. 92
Menteng – Jakarta Pusat 10310
021-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com**